

Siswa SD-SMA Demo.....

Dari Halaman 1

Dia pun memastikan situasi di Yalimo tetap kondusif. Benny mengaku telah meminta para siswa agar melihat terlebih dulu bagaimana

program MBG berjalan. "Biar program ini berjalan dulu, nanti sambil berkembang. Kita juga berharap agar aksi tersebut dapat berjalan aman dan damai," ucapnya. Adapun dalam video yang beredar, tampak

Kejagung Sita Rp565 Miliar

Dari Halaman 1

impur gula periode eks Menteri Perdagangan Tom Lembong tahun 2015-2016. "Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan telah melakukan penyitaan uang sebanyak Rp565.339.071.925,25," ujar Direktur Penyidikan Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers, Selasa (25/2). Qohar menyebut uang tunai itu disita dari pengembalian yang dilakukan oleh sembilan orang tersangka dari pihak swasta. Berikut rinciannya. 1. Tonny Wijaya Ng selaku Direktur Utama PT Angels Products senilai Rp150.813.450.163,81 2. Wisnu Hendraningrat selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo senilai Rp60.991.040.276,14 3. Hansen Setiawan selaku Direktur

Utama PT Sentra Usahatama Jaya senilai Rp41.381.685.068,19 4. Indra Suryaningrat selaku Direktur Utama PT Medan Sugar Industry senilai Rp77.212.262.010.000,81 5. Then Surianto Eka Prasetyo selaku Direktur Utama PT Makassar Tene senilai Rp39.249.282.287,52 6. Hendrogianto Antonio Tiwon selaku Direktur PT Duta Sugar Internasional senilai Rp41.226.293.808,16 7. Ali Sanjaya selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas senilai Rp47.868.288.631,28 8. Hans Falita Hutama selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur senilai Rp74.583.958.290,79 9. Eka Sapanca selaku Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama senilai Rp32.012.811.588,55 Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan eks Direktur PT Perusahaan Perdagangan

sejumlah siswa memakai seragam sekolah berjalan kaki. Para siswa yang berjalan nyaris memenuhi ruas jalan. Aksi para siswa tersebut dikawal aparat kepolisian. Tampak juga para guru mendampingi siswanya dalam aksi tersebut.(**cnni/js**)

Indonesia (PPI) berinisial CS sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula. Tom Lembong dinilai menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menteri Perdagangan dengan mengeluarkan izin Persetujuan Impor (PI) dengan dalih pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula nasional meskipun Indonesia sedang surplus gula. Tom Lembong juga diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) untuk diolah menjadi gula kristal putih (GKP) kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Dalam kasus ini, Kejagung menyebut nilai kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mencapai Rp578 miliar. Terbaru, Kejagung menetapkan total sembilan orang tersangka dari perusahaan swasta yang ditunjuk sebagai tempat pengolahan GKM menjadi GKP oleh Kemendag.(**cnni/js**)

Kades Kohod Ditahan

Dari Halaman 1

rambutnya setelah Arsin ditahan. Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Kedzoliman (Amak) Desa Kohod, Alar Jiban, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, mencukur gondul secara massal sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Bareskrim Polri dalam mengungkap kasus pemalsuan SHGB/SHM pagar laut di daerah itu. Ketua Aliansi Masyarakat Anti Kedzoliman (Amak), Oman di Tangerang, Selasa, mengatakan aksi cukur rambut gondul secara massal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat. Di mana, katanya, aparat penegak hukum (APH) sudah berhasil menangkap Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin hingga Sekretaris Desa (Sekdes) Ujang Karta sebagai pelaku pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Hak Milik lahan di perairan pesisir pantai utara tersebut. "Iya, intinya kami syukuran diawali cukur rambut gondul secara massal, dan sedikit selamatan, doa bersama dengan warga di Alar Jiban," kata Oman dilansir Antara, Selasa (25/2/2025).

Ia mengatakan aksi ini diikuti sekitar 50 warga Alar Jiban, Desa Kohod, yang selama ini diklaim menjadi korban ketidakadilan atas penyerobotan lahan dan pagar laut yang dilakukan oknum perangkat desa setempat. "Dari semalam, kami, setelah kami mendapat kabar adanya penetapan tersangka dan penahanan oleh Polri, langsung cukur rambut bersama warga," ucapnya. Dia juga mengaku, bila aksi cukur gondul tersebut merupakan nazar atau janji dari masyarakat setempat apabila kasus pagar laut bisa dituntaskan secara cepat oleh negara. Sehingga, pihaknya melakukan aksi sukarelawan sebagai bentuk mengekspresikan rasa syukur. "Ini sudah janji kami, ketika Kepala Desa Arsin dan Sekdesnya Ujang Karta tertangkap atau ditahan oleh pihak berwajib. Kami warga Alar Jiban sudah dari awal akan dibotak kepalanya atau plontos secara massal," ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas keberhasilan dalam mengungkap permasalahan SHGB/SHM pagar laut secara tegang benderang

tanpa adanya hal yang ditutup-tutupi. "Iya kami selaku warga syukur Alhamdulillah dan terimakasih kepada pihak Mabes Polri yang menjalankan tugasnya secara profesional," kata dia. Ke depan, seluruh masyarakat khususnya warga Kabupaten Tangerang berharap agar polisi bisa kembali menangkap pelaku utama atau dalang dibalik polemik pagar laut tersebut. "Dari kami belum puas kalau cuma kades dan sekdes aja, apalagi yang ditetapkan hanya empat orang dari luar desa atau kategorikan mediator atau jasa pembuatan SHM/SHGB. Kami harap ada lagi pelaku utama yang segera di panggil dan ditangkap," demikian dikatakan Oman. Sementara itu, berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah warga Alar Jiban, Desa Kohod secara sukarelawan bergantian untuk melakukan cukur gondul. Selain itu, sebagai ekspresi kegembiraan tersebut, sejumlah warga juga memakai kaos berlatar belakang bergambar Kades Kohod Arsin yang ditangkap polisi. Kemudian, mereka melantunkan doa serta makan bersama sebagai bentuk syukur.(**det/js**)

68 WNI Gagal Divonis Mati

Dari Halaman 1

"Ada 70 rakyat Indonesia yang sudah dijatuhi hukum oleh Mahkamah Malaysia sebagai hukuman mati," kata Saifuddin di gedung Kemenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan, Jakarta Selatan, Selasa (25/2). Saifuddin mengatakan, pemerintah Malaysia kemudian melakukan reformasi undang-undang. Reformasi itu mengatur terpidana mati bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah Tinggi Malaysia untuk diberikan pengurangan hukuman. Lewat aturan tersebut, jumlah WNI yang sempat menerima vonis mati di Malaysia berkurang drastis. Saat ini hanya tersisa dua WNI yang menerima vonis mati di Malaysia. "Daripada jumlah 70 banduan akhir Indonesia yang telah dijatuhi hukuman mati, telah mengemukakan appeal kepada Mahkamah Persekutuan. Darpada jumlah 70 itu, 68 telah diubah keputusan hukuman mati kepada penjara seumur hidup," katanya. Hari ini Saifuddin bertemu dengan Menteri

Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membahas sejumlah persoalan yang melibatkan Indonesia dan Malaysia. Salah satu isu yang ikut dibahas keduanya ialah persoalan WNI yang overstay di Malaysia. Menurut Saifuddin, saat ini tercatat 3.000 WNI yang berstatus overstay di Malaysia. Ribuan WNI itu saat ini tengah ditahan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Malaysia. "Kami juga sekarang mempunyai hampir, kiraan hampirnya sekitar 3 ribuan rakyat Indonesia yang ditempatkan di depo imigrasi karena melakukan beberapa kesalahan seumpama masuk dan tinggal di Malaysia tanpa dokumen sama sekali. Itu merupakan kesalahan imigrasi," jelas Saifuddin. Saifuddin mengatakan pemulangan WNI yang bermasalah dalam urusan imigrasi juga dibahas saat bertemu dengan Yusril. Dia menyebut akan ada kemudahan yang diberikan dalam pemulangan WNI tersebut. Secara aturan di Malaysia, tiap warga negara asing yang berstatus overstay akan disidang ke pengadilan hingga kemudian dijatuhi huku-

man penjara. Namun, lewat kerja sama Malaysia dan Indonesia, para WNI yang berstatus overstay itu hanya diminta membayar denda untuk bisa pulang ke Tanah Air. "Maksud dipermudahkan adalah pemerintah Malaysia akan memintakan compound kepada mereka. Serentak mereka melunaskan compound atau denda ini, mereka kemudiannya dibawa pulang tanpa perlu dijatuhi hukuman pemenjaraan," jelas Saifuddin. Dalam pertemuan ini kedua negara juga membahas soal pertukaran narapidana yang ditahan di masing-masing negara. Malaysia dan Indonesia sepakat untuk membentuk tim gabungan dalam membahas teknis pemulangan narapidana tersebut. "So, the detail itu akan diuruskan di peringkat officers. Tapi di peringkat saya dan Pak Yusril adalah mencapai kata sepakat persetujuan. Apakah boleh kedua-dua negara ketika ITOP atau International Transport of Prisoners belum lagi mengikat kedua-dua negara, apakah ada ikhtiar lain? Jadi sepakat diskusi hari ini, kedua-dua negara cenderung ke arah itu," pungkas Saifuddin.(**det/js**)

Mengarahkan Kepala Desa untuk Kemenangan

Dari Halaman 1

Yandri terbukti melaksanakan dan menghadiri kegiatan yang mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningih dalam keterangannya di laman resmi MK. Enny meyakini posisi kepala desa dan pemerintahan desa merupakan posisi yang secara kelembagaan berada di bawah koordinasi Kementerian Desa yang dipimpin Yandri. Karenanya, Enny melihat tak dapat dihindari ada pertautan erat kepentingan antara para kepala desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Yandri. Enny merinci salah satu acara yang dihadiri oleh Mendes Yandri dan Ratu adalah rapat kerja cabang (Rakercab) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang di Hotel Marbella Anyer pada 3 Oktober 2024. Dalam acara tersebut, Enny mengacu kesaksian para saksi dan menemukan fakta adanya dukungan para kepala desa terhadap pasangan Ratu-Najib. Kepala Desa Bojong Pandan, Hulman yang dihadirkan sebagai saksi yang menyampaikan adanya keterlibatan Mendes Yandri. Hulman yang juga merupakan Sekretaris DPC APDESI Kabupaten Serang mengakui bahwa setelah acara Rakercab APDESI Kabupaten Serang tersebut, ia berkoordinasi dengan tim pemenang pasangan Ratu-Najib. Hal tersebut tegas melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). "Norma ini juga berlaku kepada H. Yandri Susanto selaku menteri, di mana menteri selaku pejabat negara, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," ujar Enny. "Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat secara signifikan

mempengaruhi sikap kepala desa selaku subjek yang menerima manfaat dalam kegiatan dan program Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sehingga berdampak secara signifikan pada tindakan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu," sambungannya. Enny menemukan tindakan atau aktivitas Yandri selaku Mendes, yang baik secara sengaja maupun tidak disengaja mempengaruhi netralitas kepala desa dan aparat desa. Sebab pada dasarnya tugas pokok dan fungsi sebagai Mendes dalam batas penalaran yang wajar secara langsung berkaitan erat dengan kepentingan para kepala desa. "Seharusnya dalam kondisi di mana salah satu pasangan calon peserta pemilu/kaada memiliki hubungan pernikahan atau hubungan keluarga dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, maka sudah semestinya menteri tersebut menghindari kegiatan atau aktivitas apalagi mengeluarkan kebijakan yang dapat mempengaruhi netralitas para aparat desa," ujar Enny. Imbas peristiwa ini, MK kemudian memutuskan membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024. MK meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Serang. MK pun membatalkan PKPU No. 2028 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024. Dihubungi terpisah, Mendes Yandri tak merespons lebih jauh soal putusan MK ini. Ia hanya mengatakan esok akan ada konferensi peran untuk menyikapi hal tersebut. "Besok Insya Allah ada jumpa pers," kata Yandri, dilansir dari CNNIndonesia.com, Selasa (25/2). CNNIndonesia.com juga menghubungi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi terkait hal ini. Namun yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini diturunkan. PAN selaku partai yang menaungi Yandri, menyebut dalam Pilpup Serang, kadernya tidak

pernah kampanye secara terbuka. "Mas Yandri itu tahu UU pemilu. Beliau itu, ikut membahas UU tersebut. Tidak hanya itu, beliau bahkan adalah wakil ketua pansusya di kala itu. Jadi aneh betul kalau keberadaan beliau sebagai menteri malah dianggap sebagai dasar untuk menganulir kemenangan pasangan Ratu-Najib," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (25/2). PAN juga menilai cara MK membatalkan kemenangan Ratu-Najib di Pilpup Serang, aneh dan janggal. Saleh mengatakan selisih suara pasangan Ratu-Najib dengan lawannya di Pilpup Serang sangat jauh. Menurutnya, tidak mungkin terjadi pelanggaran yang bersifat TSM. "PAN menilai bahwa putusan MK terkait pilkada Kabupaten Serang agak aneh dan janggal. Pasalnya, selisih suara antar pasangan di dalam pilkada itu sangat jauh. Tidak mungkin rasanya ada pelanggaran yang bersifat TSM," kata Saleh. Dari laporan di lapangan, ia mengklaim banyak masyarakat yang tidak puas dan mempertanyakan soal putusan MK tersebut. "Masyarakat tahu bahwa pasangan Ratu-Najib jauh unggul di atas pasangan lawan. Ratu-Najib kemarin mendapatkan suara 598.654 suara, sedangkan lawannya hanya memperoleh 254.494 suara. Pasangan Ratu-Najib unggul lebih dua kali lipat," kata Saleh. Meski demikian, ia mengatakan PAN memahami situasi dan dinamika yang terjadi. Ia berharap masyarakat tetap konsisten dan solid mendukung pasangan Ratu-Najib. Ia menegaskan PAN tidak khawatir dengan gelaran pemungutan suara ulang (PSU) karena yakin Ratu-Najib akan kembali menang. "Tapi memang tetap agak disesalkan. Sebab, dengan PSU di seluruh TPS, akan menghabiskan waktu dan uang yang tidak sedikit. Penyelenggara harus bekerja keras lagi memfasilitasi penyelenggaraan pilkada. Regenerasi kepemimpinan di Serang akan lambat karena terkendala PSU," katanya.(**cnni/js**)

Kejagung Tetapkan

Dari Halaman 1

penyitaan itu dilakukan usai penyidik menggeledah kantor Pertamina dan rumah para tersangka. "Kami menemukan dokumen, barang bukti elektronik. Dari alat bukti itu didalami juga kita panggil ahli dan juga ada alat bukti transaksi," ujar Qohar di Jakarta, Selasa (25/2). Qohar mengatakan seluruh barang bukti itu masih didalam penyidik. Adapun dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan tujuh orang tersangka yang terdiri dari empat pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta. Salah satunya yakni Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Kemudian SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, AP selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International. Selanjutnya MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jengala Maritim, dan YRJ selaku Komisaris PT Jengala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera. Kejagung menyebut total kerugian kuasa negara dalam perkara korupsi ini mencapai Rp193,7 triliun. Rinciannya yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun. Selain itu kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun; kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun; dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.(**cnni/js**)

KPK Usut Kasus

Dari Halaman 1

Alun Trisambodo diproses hukum oleh KPK. Rafael telah divonis bersalah atas kasus gratifikasi dan pencucian uang. Ia dihukum pidana penjara 14 tahun. Adapun kasus tersebut dibongkar setelah anak Rafael, Mario Dandy Satriyo, menjadi pelaku penganiayaan berat terhadap Crystalino David Ozora.(**cnni/js**)

Israel Kerahkan

Dari Halaman 1

tank-tank mereka ke wilayah Tepi Barat. Situasi di kamp pengungsi Jenin saat ini, seperti dilansir Reuters, Selasa (25/2), hampir kosong dan gang-gang yang dahulu ramai kini sepi dengan aktivitas penghancuran oleh militer Israel membuat jalanan menjadi lebih lebar namun tanpa tanda kehidupan. Taktik semacam ini dikawatirkan mengulangi taktik yang sudah diterapkan di Jalur Gaza, dengan pasukan Israel bersiap untuk melaksanakan operasi jangka panjang di wilayah Tepi Barat. Warga Palestina di sana mengkhawatirkan operasi "pembersihan" seperti yang terjadi di Jalur Gaza. Sedikitnya 40.000 warga Palestina telah mengungsi dari rumah-rumah mereka di Jenin dan kota terdekat Tulkarem di Tepi Barat bagian utara sejak Israel memulai operasi militernya hanya sehari setelah perjanjian gencatan senjata Gaza tercapai usai perang berkecamuk selama 15 bulan terakhir. "Jenin adalah pengulangan dari apa yang terjadi di Jabalia," sebut juru bicara pemerintah kota Jenin, Basheer Matahen, merujuk pada kamp pengungsi di wilayah Jalur Gaza bagian utara yang "dibersihkan" oleh pasukan Israel usai pertempuran sengit selama berminggu-minggu. "Kamp ini sudah tidak bisa dihuni lagi," ucapnya. Matahen menyebut 12 bulldoser menghancurkan rumah-rumah dan infrastruktur di area kamp itu.(**det/js**)



Keresahan Terhadap MBG

Dari Halaman 1

mendesak dibandingkan program pemberian makanan bergizi. Penolakan ini mencerminkan pandangan bahwa program MBG tidak menjawab akar permasalahan pendidikan di Papua. Tantangan seperti minimnya infrastruktur, kekurangan tenaga pengajar, dan kesenjangan kualitas pendidikan dianggap lebih penting untuk segera diatasi. Aksi demonstrasi ini mendapat perhatian luas, dan beberapa pihak menilai bahwa respon terhadap aksi para pelajar tersebut berlebihan dan dapat melanggar hak asasi manusia. Penolakan terhadap program MBG oleh pelajar di Papua Tengah menyoroti pentingnya penyesuaian kebijakan pemerintah dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dialog antara pemerintah dan komunitas lokal menjadi krusial untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar efektif dan tepat sasaran. Jika ada siswa SD, SMP, dan SMA menggelar aksi di kantor Bupati Papua Tengah untuk menolak MBG (Mekanisme Benefit Sharing atau kebijakan lainnya), ini menunjukkan bahwa ada isu penting yang mereka rasakan secara langsung atau mendapat dukungan dari masyarakat dan orang tua mereka. Jika anak-anak sekolah ikut dalam aksi, ini bisa menandakan bahwa isu yang diangkat berdampak luas, bahkan hingga ke dunia pendidikan. Pertanyaannya: apakah mereka memahami substansi MBG atau ada pihak tertentu yang mengarahkan mereka? Aksi ini mencerminkan adanya keresahan masyarakat terhadap MBG. Pemerintah daerah sebaiknya merespons dengan dialog terbuka agar ada solusi yang tidak merugikan pihak mana pun. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa keterlibatan siswa dalam aksi ini benar-benar berasal dari kesadaran mereka sendiri dan bukan karena tekanan pihak lain. Penolakan MBG oleh pelajar Papua adalah bentuk komunikasi politik dari bawah (bottom-up), yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah perlu mengubah pendekatan komunikasi dengan lebih banyak berdialog dan mempertimbangkan kebutuhan yang lebih mendasak, seperti pendidikan gratis. Jika komunikasi politik tidak dikelola dengan baik, aksi ini bisa berkembang menjadi gerakan sosial yang lebih besar dan memperkuat ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Pendekatan represif tidak akan menyelesaikan konflik ini. Pemerintah harus lebih fokus pada dialog dan komunikasi yang terbuka. Komunikasi politik harus berubah dari sekadar menginformasikan menjadi membangun keterlibatan masyarakat. Mengadaptasi kebijakan berdasarkan masukan masyarakat bisa menjadi solusi win-win. Jika masyarakat merasa aspirasinya didengar, kepercayaan terhadap pemerintah bisa meningkat. Jika pemerintah dapat mengelola komunikasi politiknya dengan baik, bukan hanya konflik ini yang bisa diredakan, tetapi juga bisa menjadi contoh keberhasilan demokrasi partisipatif di Papua.